



PEMERINTAH KOTA
SURABAYA

2025

PROFIL GENDER

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua..

Surabaya, September 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	4
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	11
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	28
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	30
BAB VI. PENUTUP	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak);

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77)
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)

2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota diatas, tugas pokok Inspektorat Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kota Surabaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Surabaya 2025 - 2029 ialah “Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi lingkup regional, nasional maupun global.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2025 - 2029 yakni sebagai berikut :

1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan, Tranformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Akses Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dengan sasaran Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah, Meningkatnya Produktifitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Unggulan, Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat, Terkendalinya Harga Keputuhan Pokok Masyarakat, Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi.
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter, Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dengan sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Meratanya Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan
3. **Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan Sasaran Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi**, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat, Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah, meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, Optimalnya Tata Kelola Pemerintah berbasis Elektronik
4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan Yang Berkelanjutan
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Terwujudnya Kesejahteraan sosial yang Inklusif, Terciptanya Masyarakat maju dan Berbudaya Dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah.

Dari uraian diatas, Inspektorat Kota Surabaya diamanahkan untuk mendukung ketercapaian **Misi 3** yakni **“Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan Sasaran Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi”** sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Surabaya yang relevan untuk mendukung ketercapaian Misi 3 tersebut.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Surabaya tahun 2025 – 2029 melalui misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

c. Motto

Inspektorat Kota Surabaya memiliki motto dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu **INSENTIF** yang merupakan singkatan dari **INspektorat Sahabat yang soluTIF**

1. Tujuan **INSENTIF** Bagi Perangkat Daerah:

- 1) Meningkatnya kepuasan Perangkat Daerah karena mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatnya keyakinan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan karena mendapatkan pendampingan dan konsultasi dari Inspektorat berupa quality insurance / jaminan kualitas.
- 3) Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan permasalahan hukum Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Tujuan **INSENTIF** Bagi Masyarakat:

- 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah karena mampu mengelola kebijakan dan memberikan pelayanan dengan baik.
- 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat karena membantu penyelesaian terkait permasalahan yang diadukan.

3. Tujuan **INSENTIF** Bagi Pemerintah Kota Surabaya:

- 1) Terwujudnya visi, misi dan program-program Kepala Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Mencegah terjadinya kemungkinan penyimpangan yang dilakukan Perangkat Daerah atas rencana yang ditetapkan.
- 3) Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- 4) Meningkatnya pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

2.3 Demografi

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unit pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Surabaya. Mereka memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai peraturan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur. Gedung Inspektorat Kota Surabaya beralamat di Jl. Sedap Malam No. 5-7 Kantor Inspektorat Kota Surabaya, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kantor ini berada di kawasan pusat kota dan berfungsi sebagai pusat koordinasi pengawasan berbagai instansi pemerintahan di wilayah Surabaya.

Susunan organisasi Inspektorat Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya, terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu Khusus;
- d. Inspektur Pembantu I;
- e. Inspektur Pembantu II;
- f. Inspektur Pembantu III;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Surabaya merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Surabaya didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 70 (Tujuh Puluh) pegawai dengan uraian sebagaimana berikut:

- a. Menurut Status Kepegawaian

1) Aparatur Sipil Negara

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 7 Orang

2) Non PNS : 16 Orang

Total : 70 Orang

- b. Menurut Golongan dan Kepangkatan

- 1) Golongan IV : 18 Orang
- 2) Golongan III : 29 Orang
- 3) Golongan II : 0 Orang
- 4) Golongan IX : 5 Orang
- 5) Golongan V : 2 Orang

- c. Menurut Tingkat Pendidikan (ASN)

- 1) Doktor : 1 Orang
- 2) Pasca Sarjana (S2) : 8 Orang
- 3) Sarjana (S1) : 39 Orang
- 4) Diploma-IV (D-IV) : 1 Orang
- 5) Diploma III (D-III) : 0 Orang
- 6) SMA : 5 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan (Tenaga Kontrak)

- 1) Sarjana (S1) : 6 Orang
- 2) SMA : 10 Orang

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Kota Surabaya tertuang pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- c. Surat Keputusan Inspektur Kota Surabaya Nomor : 411.44/1919/436.6/2020 tentang Pedoman Pengawasan Atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender
- d. Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- e. Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.
- f. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2024 Tentang Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) Kartini Kota Surabaya

Data Pendukung terdapat Pada Link: Kebijakan

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat Kota Surabaya dibutuhkan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.

Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada :

1. Pada Hari Kamis - Jum'at, Tanggal 9-10 Januari 2025, Inspektorat Kota Surabaya sebagai Tim penggerak PUG Mengikuti Desk Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan di Siola Lt IV
2. Pada Hari Senin, Tanggal 21 April 2025 Inspektorat Kota Surabaya Menghadiri Pertemuan Pokja dan Internalisasi PUG Perangkat Daerah kota Surabaya Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Majapahit Lt III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
3. Pada Hari Jumat, Tanggal 25 April 2025 Inspektorat Mengadakan Rapat Internal perihal Internalisasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 di Inspektorat

4. Pada Hari Kamis, Tanggal 04 September 2025 Inspektorat Menghadiri Undangan Pembahasan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Penganugerahan Parahita Ekapraya KEMENPPPA dan Database Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya Tahun 2025 di Ruang Pertemuan DP3APPKB Lantai II Kota Surabaya
5. Pada hari Jumat – Selasa tanggal 6 – 10 Juni 2025 Inspektorat Kota Surabaya mengikuti Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur bertempat di Convention Hall Lantai 4 Gedung SIOLA Jl. Tunjungan No. 1 Surabaya

Link data dukung : Sosialisasi PUG

2.4.3 SDM Terlatih PUG

a. SDM terlatih PUG di Inspektorat Kota Surabaya sebagai berikut :

1. SDM Perencanaan dan penganggaran terlatih PUG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Anis Nur Samsiati SE, M.A.P	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Pelatihan
2.	Rima Hanny Andanty S.E.	Auditor Ahli Pertama	Sertifikat Pelatihan
3.	Hendy Kurniawan	Pengolah Data dan Informasi	Sertifikat Pelatihan
4	Fezar Abdarah S.E	Auditor Ahli Muda	Sertifikat Pelatihan
5	Rahmat Khoirudin, S.E	Auditor Ahli Pertama	Sertifikat Pelatihan
6	Triwahjuni Aprianti SE, MM	Auditor Ahli Madya	Sertifikat Pelatihan
7	Eenly Putri Yosvitania S.I.Kom.	Penata Layanan Operasional Sekretariat	Sertifikat Pelatihan
Jumlah SDM Perencanaan Dan Penganggaran Terlatih PUG		Jumlah SDM Inspektorat	%
7		54	12,96 %

2. SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan yang Terlatih PUG

Jumlah SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan Terlatih PUG	Jumlah SDM Inspektorat	%
26	54	48,15 %

3. SDM Aparat Penegak Hukum

Jumlah Aparat Penegak Hukum Terlatih PUG	Jumlah SDM Inspektorat	%
0	58	0 %

Adapun data dukung pada link berikut : [SDM Terlatih PUG](#)

b. Focal Point PUG

Sesuai Keputusan Walikota Surabaya nomor 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya, maka Focal Point Inspektorat Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Anis Nur Samsiati SE, M.A.P	Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian

c. Pokja PUG Inspektorat Kota Surabaya

Sesuai Keputusan Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya, pokja PUG Inspektorat terdiri atas :

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M	Pembina	Inspektur
2.	Arin Diana Erniawati, S.E	Ketua	Sekretaris
3.	Anis Nur Samsiati, S.E, MAP	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian
4.	Tatang Imawan, SE	Anggota	Inspektur Pembantu Khusus
5.	Anang Koerniawan, S.E., M.M	Anggota	Inspektur Pembantu I
6.	Andy Prihandoko, ST, MT, M.Sc	Anggota	Inspektur Pembantu II
7.	Sjahfriel Iman, S.E	Anggota	Inspektur Pembantu III
8.	Bheki Jarot Triatmodjo, S.E, Ak	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

1. Jumlah SDM Inspektorat Kota Surabaya

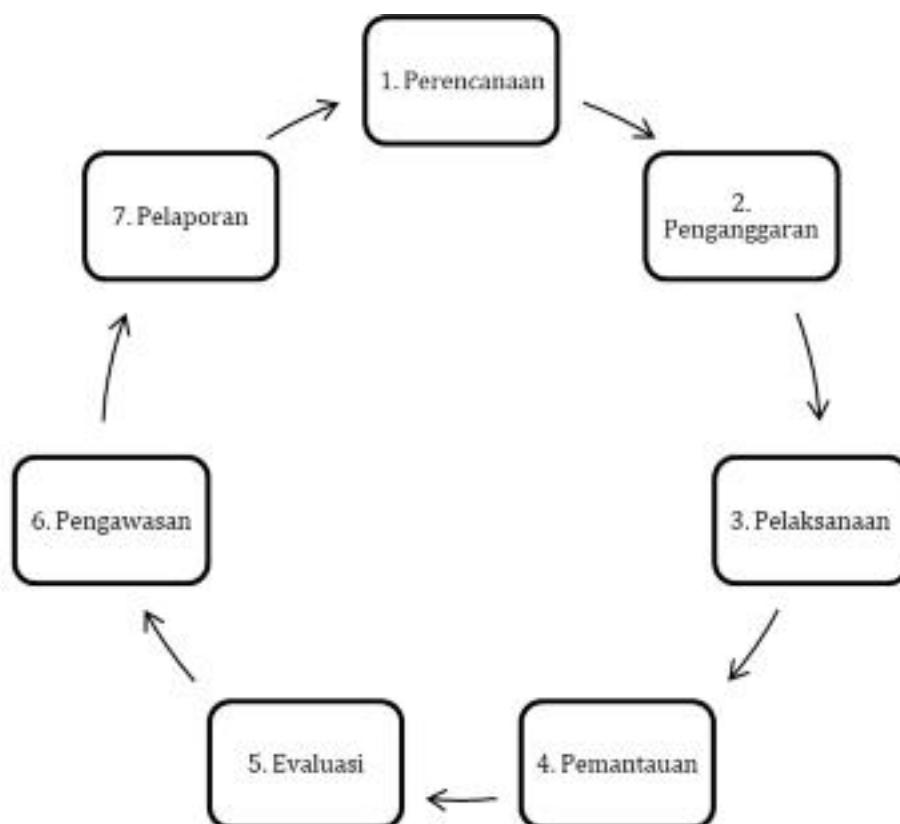
No .	JENIS KETENAGAAN	ASN/NON ASN	JUMLAH JENIS KELAMIN		JUMLAH TOTAL
			L	P	
1	Inspektur	ESELON II	1	0	1
2	Sekretaris	ESELON III	0	1	1
3	Inspektur Pembantu	ESELON III	4	0	4
4	Kasubagkeu	ESELON IV	1	0	1
6	Ketua Tim Kerja		0	1	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor)		13	16	29
8	Jabatan Fungsional Tertentu (PPUPD)		2	3	5
9	Jabatan Fungsional Umum		6	6	12
10	Tenaga Kontrak		15	1	16
TOTAL			42	28	70

Adapun rincian data terpilah terdapat pada link berikut : [Data Terpilah dan sistem publikasinya](#)

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

SK Inspektur Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.

Link SK : [SK PUG Inspektorat](#)

b. Renstra dan Renja Inspektorat Kota Surabaya yang Responsif Gender

Dengan integrasi pengarusutamaan gender dalam Renstra dan Renja, Inspektorat Kota Surabaya tidak hanya berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, tetapi juga dalam mendukung kesetaraan gender di semua lini kebijakan dan program yang diawasi.

Isu gender dalam isu strategis Inspektorat Kota Surabaya antara lain :

(1) Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah, (2) Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah, (3) Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.

Link Renstra dan Renja Inspektorat Kota Surabaya : [Data Renja Renstra Inspektorat 2025](#)

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS)

Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Action Budget (GAB), adalah instrumen penting dalam penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) di Inspektorat Kota Surabaya. GAP akan membantu dalam menganalisis isu-isu gender yang relevan dalam program pengawasan dan audit. GAB adalah dokumen Anggaran responsif Gender yang merupakan penyederhanaan antara Dokumen Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement dan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pelaksanaan program yang adil bagi laki-laki dan perempuan kelompok rentan. dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program-program yang mendukung kesetaraan gender di lingkungan Inspektorat dan memastikan hasil yang

diinginkan tercapai. Melalui penerapan dokumen-dokumen tersebut, Inspektorat dapat lebih efektif dalam menjalankan penganggaran yang responsif gender, memastikan bahwa setiap program yang diawasi atau diaudit berdampak positif dan seimbang bagi seluruh kelompok.

Link Dokumen GAP, GBS Inspektorat Kota Surabaya : [GAP dan GBS](#)

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Action Budget (GAB). Terdapat 12 sub kegiatan tahun 2025 di Inspektorat Kota Surabaya yang telah disusun GAP dan GAB nya.

Link Dokumen : [Hasil Analisis Gender Inspektorat Kota Surabaya](#)

e. Alat analisis gender

Alat dan teknik analisis gender yang digunakan adalah model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen utama Gender Analysis Pathwa (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :

- Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut jenis kelamin atau kelompok rentan baik kuantitatif maupun kualitatif
- Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal)
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal)
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.**

b. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2025 - 2029 yang selaras dengan :

- RPJMD Kota Surabaya 2025 - 2029
- Renstra Inspektorat Kota Surabaya tahun 2025-2029
- Renja Inspektorat Kota Surabaya
- Surat Keputusan Inspektorat Kota Surabaya Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.
- GAP, TOR, dan GBS Inspektorat Kota Surabaya

Data dukung sebagaimana link berikut :

SK Tim Focal Point : [SK Tim Focal Point](#)

Perencanaan Inspektorat : [Renja & Renstra](#)

PPRG Inspektorat : [GAB dan GBS](#)

c. Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Inspektorat, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 345.400.000,-
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 343.200.000,-
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 242.400.000,-
4	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 324.850.000,-
5	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 560.745.000,-
6	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp 233.400.000,-
7	Reviu Laporan Kinerja	Rp 303.175.000,-
8	Reviu Laporan Keuangan	Rp 387.175.000,-
9	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 445.760.000,-
10	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 597.810.000,-
11	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 317.900.000,-
12	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp 304.400.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp 4.406.215.000,-

3.2 Pelaksanaan

a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

No	Bidang	Kegiatan
1.	Politik	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan bahwa kebijakan politik dan anggaran di Kota Surabaya dibuat dengan mempertimbangkan perspektif gender. Ini termasuk meninjau anggaran agar alokasinya dapat memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik.- Melibatkan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran yang berfokus pada pemberdayaan politik perempuan.
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan penguatan UMKM dalam program inkubasi UMKM
3.	Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Bakti Sosial- Penyaluran infaq ke Baznas
4.	Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi Pentingnya PUG dan KRPPA- Sosialisasi peran APH, PKBM dan Satgas
5.	Lainnya	<ul style="list-style-type: none">- Audit Kinerja Penanganan Stunting- Audit Kinerja Penurunan Kemiskinan

b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdapat di Inspektorat Kota Surabaya antara lain Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota Surabaya memiliki peran penting sebagai lembaga pemberdayaan perempuan di lingkungan Inspektorat. Berikut adalah fungsi DWP dalam konteks pemberdayaan perempuan:

1. Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Kapasitas

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota Surabaya mengembangkan kapasitas perempuan di lingkungan Inspektorat, baik pegawai maupun istri pegawai, melalui berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan pengembangan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan seperti kewirausahaan, kerajinan tangan, manajemen keuangan keluarga, dan pelatihan lain yang

mendukung kemandirian Perempuan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan di lingkungan Inspektorat, sehingga mereka lebih berdaya secara ekonomi dan sosial.

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kota Surabaya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengedukasi anggota tentang pentingnya peran perempuan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karier. DWP Inspektorat Kota Surabaya dapat mengadakan program-program yang berfokus pada kesehatan keluarga, seperti seminar tentang kesehatan reproduksi, pola asuh anak, dan pengelolaan keuangan keluarga yang responsif gender. Kegiatan yang diadakan DWP Inspektorat Kota Surabaya tersebut bermanfaat dalam memberikan dukungan kepada perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

DWP Inspektorat Kota Surabaya mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Inspektorat dengan mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan organisasi.

DWP Inspektorat Kota Surabaya menyelenggarakan forum-forum diskusi di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam memberikan ide dan masukan yang relevan terhadap kebijakan organisasi. Hal ini mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lingkungan kerja, sehingga tercipta kesetaraan gender.

4. Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kerja

DWP Inspektorat Kota Surabaya membantu mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Inspektorat dengan mendorong kebijakan yang responsif gender dan memastikan pelaksanaan kesetaraan gender dalam kebijakan dan program kerja misalnya dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja, seperti pemberian cuti melahirkan, ruang laktasi, dan fleksibilitas jam kerja. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender, sehingga perempuan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, DWP Inspektorat Kota Surabaya berperan penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, baik dalam lingkup keluarga, lingkungan kerja, maupun dalam partisipasi sosial, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih baik.

c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Inspektorat

Inspektorat Kota Surabaya dapat berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai langkah strategis, terutama dalam pengawasan, evaluasi kebijakan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan :

1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan

- Inspektorat dapat memastikan bahwa kebijakan perlindungan perempuan, termasuk program pencegahan kekerasan berbasis gender, diterapkan dengan baik oleh Perangkat Daerah terkait. Ini termasuk memantau implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak di Surabaya.
- Melakukan audit kinerja terhadap dinas terkait untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankan sesuai dengan standar dan benar-benar efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan.

2. Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Program Pengawasan

- Memastikan bahwa perspektif gender selalu diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah yang diawasi oleh Inspektorat. Hal ini untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan perempuan diakomodasi dengan baik, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
- Mendorong penerapan gender-responsive budgeting (penganggaran yang memperhatikan aspek gender) untuk mendukung program-program yang bertujuan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

3. Sosialisasi dan Edukasi Internal

- Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai Inspektorat terkait isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk hukum-hukum yang berlaku, mekanisme pengaduan, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil di lingkungan pemerintahan.
- Membentuk tim internal yang bertugas untuk memberikan penanganan khusus jika ada kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, memastikan bahwa setiap pegawai perempuan mendapatkan perlindungan yang layak.

4. Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Internal Pemerintah

- Mengawasi perilaku pegawai negeri dan pejabat pemerintahan di Surabaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Inspektorat dapat menindaklanjuti laporan atau indikasi pelanggaran terkait pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- Menerapkan aturan zero tolerance terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pemerintahan, serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Dengan peran pengawasan, pemantauan, dan pembinaan, Inspektorat dapat berkontribusi besar dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan.

d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Inspektorat Kota Surabaya

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Inspektorat Kota Surabaya bisa mencakup berbagai program dan fasilitas yang mendukung hak dan perlindungan perempuan serta anak di lingkungan pemerintahan, di antaranya :

1. Layanan Pengaduan Kekerasan :

- Inspektorat dapat menyediakan layanan pengaduan internal bagi pegawai perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi di lingkungan kerja. Layanan ini dapat memfasilitasi pelaporan yang aman dan rahasia untuk kasus kekerasan berbasis gender.
- Pegawai yang menjadi korban bisa mengajukan laporan yang akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat sesuai dengan aturan disiplin PNS dan aturan yang berlaku di pemerintahan.

2. Pusat Konsultasi dan Pendampingan :

- Inspektorat dapat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) atau unit layanan sejenis untuk memberikan pendampingan kepada pegawai perempuan dan anak yang membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk psikologis, hukum, maupun sosial.

3. Sosialisasi dan Pelatihan Kesetaraan Gender :

- Inspektorat dapat menyelenggarakan sosialisasi program-program pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada seluruh pegawai. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi, dan kekerasan.

4. Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak :
 - Inspektorat memiliki peran dalam monitoring dan evaluasi program-program pemerintah kota yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi ini meliputi pengawasan terhadap OPD yang terlibat dalam penanganan perempuan dan anak, termasuk memastikan ketersediaan layanan bagi korban kekerasan.

Dengan adanya layanan-layanan ini, Inspektorat Kota Surabaya berperan penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik di internal organisasi maupun dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih luas.

e. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Kota Surabaya dijalankan oleh Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengedukasi anggota tentang pentingnya peran perempuan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karier. Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya dapat mengadakan program-program yang berfokus pada kesehatan keluarga, seperti seminar tentang kesehatan reproduksi, pola asuh anak, dan pengelolaan keuangan keluarga yang responsif gender. Hal ini dapat memberikan dukungan kepada perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

Inspektorat Kota Surabaya dapat mendukung ketersediaan layanan bagi keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif dan fasilitas yang ramah keluarga dan berorientasi pada keseimbangan peran laki-laki dan perempuan lewat layanan peningkatan kualitas keluarga yang tertuang dalam program-program kerja Dharma Wanita Inspektorat dan Inspektorat Kota Surabaya sendiri sebagai instansi pengawas. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung keseimbangan

peran antara perempuan dan laki-laki, baik di ranah domestik maupun profesional.

h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender oleh Inspektorat Kota Surabaya dapat mencakup pengawasan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di wilayah kota yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Inspektorat dalam mendukung program pembangunan berbasis wilayah dengan perspektif gender:

1. Audit dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Program ini memastikan bahwa program pembangunan di seluruh wilayah Kota Surabaya sudah mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender. Ini mencakup infrastruktur, pelayanan publik, dan akses ekonomi bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Program ini dilaksanakan antara lain dengan melakukan audit kinerja atas program pembangunan yang diterapkan oleh kecamatan, kelurahan, dan unit lain di wilayah Surabaya, untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Memonitor alokasi anggaran berbasis gender di tingkat wilayah, memastikan bahwa program-program pembangunan memberikan perhatian pada kebutuhan perempuan, seperti fasilitas umum yang ramah anak dan perempuan (misalnya, ruang laktasi di fasilitas umum).

2. Pengawasan Program Infrastruktur Responsif Gender

Program ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat wilayah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Implementasi atas program ini antara lain dengan mengawasi proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang memastikan aksesibilitas bagi semua kelompok, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Melakukan audit terhadap ruang publik yang ramah gender, seperti taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas ramah anak dan ruang aman bagi perempuan.

3. Kolaborasi dengan OPD Lain untuk Implementasi PUG di Wilayah

Memastikan kerja sama antara Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat pengawasan program berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender.

Berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat wilayah sudah responsif gender. Mengadakan diskusi dan forum evaluasi berkala dengan kecamatan dan kelurahan untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam penerapan pembangunan responsif gender.

Dengan program-program ini, Inspektorat Kota Surabaya dapat membantu memastikan bahwa pembangunan di wilayah kota dilakukan secara adil dan inklusif, memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan.

i. **Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal Inspektorat Kota Surabaya dan jejaring**

Sampai dengan Agustus 2025, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada data di Inspektorat Kota Surabaya.

j. **Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender di Inspektorat Kota Surabaya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua pegawai, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa bentuk sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Inspektorat Kota Surabaya untuk mendukung kesetaraan gender mencakup:

1. Fasilitas Toilet yang Inklusif

Menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan serta memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas toilet yang inklusif dapat mendukung kebutuhan khusus pegawai perempuan dan laki-laki secara adil.

Fasilitas ini bermanfaat memberikan kenyamanan dan privasi bagi seluruh pegawai, termasuk kebutuhan perempuan seperti sanitasi yang memadai.

2. Ruang Beribadah atau Musholla

Dalam perspektif responsif gender, ruang ibadah memiliki peran penting untuk memastikan kesetaraan akses dan kenyamanan bagi semua pengguna, baik laki-laki maupun perempuan, serta memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing kelompok.

Ruang ibadah responsif gender ini dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus perempuan, seperti area untuk wudhu dengan penutup privasi serta ruang ganti bagi perempuan yang membutuhkan. Fasilitas ini memastikan bahwa perempuan dapat beribadah tanpa merasa terganggu atau terbatas oleh keterbatasan infrastruktur.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Di Inspektorat Kota Surabaya, sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan dan kebersihan dapat mencakup:

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Menyediakan APAR di tempat-tempat strategis di seluruh kantor Inspektorat untuk menghadapi keadaan darurat kebakaran yang memungkinkan penanganan cepat saat kebakaran skala kecil terjadi, sehingga mencegah penyebaran api dan meminimalkan risiko kerugian material atau korban jiwa.

b. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Menyediakan titik kumpul yang jelas dan jalur evakuasi yang aman serta dilengkapi dengan petunjuk arah evakuasi untuk digunakan dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Jalur evakuasi yang aman dan titik kumpul yang ditentukan akan mempermudah evakuasi seluruh pegawai dengan cepat dan teratur, mengurangi kepanikan dan risiko cedera dalam situasi darurat.

c. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dan Orang Tua

Menyediakan Ramp yaitu sebuah jalan atau jalur miring yang dirancang untuk menghubungkan dua area dengan ketinggian yang berbeda.

Memudahkan akses bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik, seperti pengguna kursi roda, orang tua, atau mereka yang membawa beban berat

d. Tempat Sampah

Menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya di seluruh area kantor. untuk mendukung kebersihan lingkungan kerja dan memfasilitasi pengelolaan sampah secara efektif dan ramah lingkungan. Pemisahan sampah juga mendukung program daur ulang dan pengurangan limbah.

Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang ini, Inspektorat Kota Surabaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, teratur, dan mendukung kenyamanan serta kesehatan seluruh pegawai.

4. Ruang Konsultasi dan Konseling

Inspektorat Kota Surabaya menyediakan ruang konseling yang responsif gender untuk membantu pegawai di lingkungan Inspektorat sendiri dan juga pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk menangani masalah pekerjaan atau keluarga yang memerlukan dukungan psikologis, terutama terkait keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karier.

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal Inspektorat dan jejaring

Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya kepada internal Inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi bagian integral dalam setiap proses, kebijakan, dan program kerja di lingkungan Inspektorat. Program pembinaan PUG dapat dilakukan melalui berbagai langkah berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi tentang PUG

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai Inspektorat mengenai konsep dasar pengarusutamaan gender, pentingnya kesetaraan gender dalam pekerjaan, serta dampak positif penerapannya di lingkungan kerja.

Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan terkait PUG, yang memberikan pemahaman mendalam tentang pengintegrasian perspektif gender dalam tugas pengawasan dan audit. Mengundang ahli atau narasumber yang kompeten di bidang kesetaraan gender untuk memberikan edukasi bagi pegawai Inspektorat.

2. Penyusunan Kebijakan Internal yang Responsif Gender

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan internal di Inspektorat memperhatikan prinsip kesetaraan gender.

Penyusunan kebijakan internal yang responsif gender mengintegrasikan prinsip-prinsip gender dalam kebijakan pengelolaan SDM, seperti rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier pegawai.

Mendorong kebijakan yang ramah perempuan, termasuk cuti melahirkan, fleksibilitas jam kerja bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab pengasuhan anak, dan cuti paternitas bagi pegawai laki-laki.

3. Penyusunan dan Pengawasan Program yang Responsif Gender

Penyusunan dan Pengawasan Program yang Responsif Gender mendorong agar setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat, termasuk dalam tugas pengawasan, mengedepankan perspektif gender. Menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dalam setiap perencanaan program Inspektorat, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi isu-isu gender dalam pelaksanaan program pengawasan dan audit.

Melakukan evaluasi program internal dengan mempertimbangkan dampak kebijakan dan program terhadap kesetaraan gender di lingkungan kerja.

4. Pelatihan PUG untuk Pegawai Pengawas dan Auditor

Pelatihan PUG bertujuan untuk membekali auditor dan pengawas Inspektorat dengan keterampilan untuk mengintegrasikan analisis gender dalam proses pengawasan dan audit. Melakukan pelatihan khusus untuk pegawai pengawas tentang bagaimana mengidentifikasi ketimpangan gender dalam program-program pemerintah yang diawasi. Menyusun laporan evaluasi yang memperhatikan kesetaraan gender, terutama dalam program-program pemerintah yang berdampak pada perempuan dan kelompok rentan.

5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan PUG di Internal Inspektorat

Inspektorat berperan penting dalam mengevaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap Perangkat Daerah (PD). Tugas Inspektorat dalam evaluasi PPRG meliputi beberapa aspek penting, sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan kesesuaian perencanaan program dengan perspektif gender dengan mengkaji apakah perangkat daerah sudah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) untuk setiap program yang berdampak pada kebutuhan laki-laki, perempuan dan kelompok rentan secara adil.
- b) Evaluasi Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program responsif gender sudah mencerminkan penganggaran yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan.
- c) Rekomendasi perbaikan dalam PPRG dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender di perangkat daerah berdasarkan hasil audit dan evaluasi, untuk membantu perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan PPRG.

d) Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PPRG dengan menyusun laporan evaluasi kinerja PPRG secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas perangkat daerah. Inspektorat menilai capaian dan dampak dari program responsif gender yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk keberhasilan dalam mencapai indikator kesetaraan gender.

Melalui tugas-tugas ini, Inspektorat berperan memastikan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan PPRG dengan baik dan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan, program, dan penganggaran. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan terkait Pemantauan dan Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya teruang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Inspektur Nomor 411.44/1919/436.6/2020 tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Evaluasi atas pelaksanaan PPRG tahun anggaran 2025 pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai Surat Perintah Inspektur Kota Surabaya yaitu dari 4 Agustus s/d 4 September 2025 2024.

Hasil monev PUG : Pemantauan dan Evaluasi

3.4 Pengawasan

Dalam pengarustamaan gender Inspektorat Kota Surabaya berperan menjalankan pengawasan dan evaluasi atas implementasinya dalam program-program di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pengawasan tersebut telah dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan atas Perencanaan dan Penganggaran Respoonsif Gender, dan Surat Keputusan Inspektur Nomor 411.44/1919/436.6/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengawasan atas Perencanaan dan Pengawasan yang Responsif Gender. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Surabaya tersebut, Perangkat Daerah telah menyusun Gender Action Budget (GAB) sejumlah 1.035 dengan total anggaran responsif gender sebesar Rp 7.584.536.717.274,00 dan mendasari penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2025. Program/kegiatan yang dilengkapi dengan lembar GBS sebagian besar merupakan program dan kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, rekomendasi Inspektorat Kota Surabaya atas penyelenggaraan pengarustamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan Dokumen PPRG Perangkat Daerah tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi Perangkat Daerah yang realisasi output kegiatannya belum tercapai untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga mampu mencapai target yang diharapkan.
- c. TAPD supaya memberikan dukungan pendanaan anggaran atas program dan kegiatan prioritas yang responsif gender.

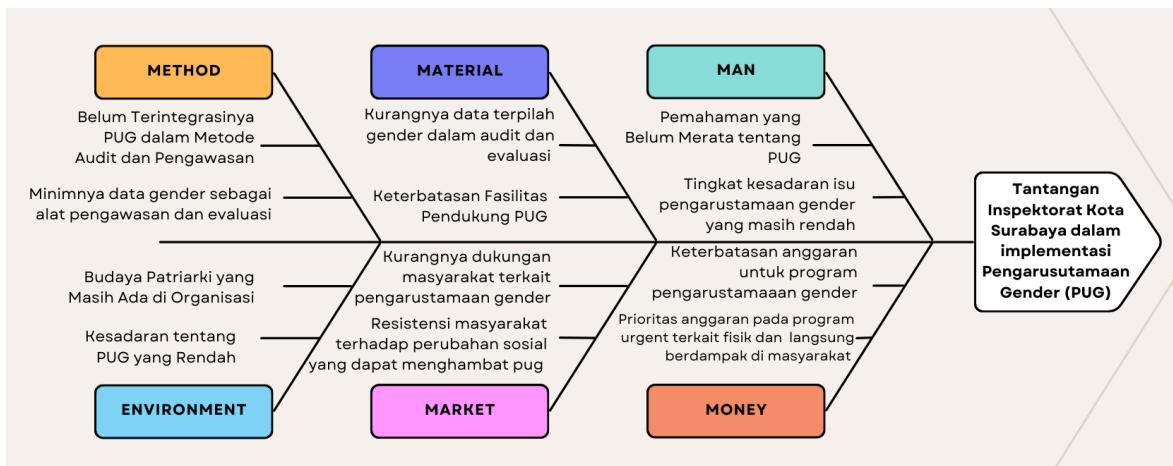
3.5 Pelaporan

Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Keputusan Inspektor Kota Surabaya Nomor 700/263/436.6/2023 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Inspektorat Kota Surabaya di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya. Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS dan TOR beserta Profil Gender Inspektorat Kota Surabaya.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

- a. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di antara pegawai Inspektorat Kota Surabaya agar tingkah kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pengawasan meningkat.
- b. Perlunya dukungan yang tak terbatas atas kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender
- c. Perlunya alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender dan pengembangan responsif gender sehingga implementasi program lebih optimal
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu gender sehingga akan berdampak pada keberhasilan program
- e. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk menilai dampak dari program Pengarusutamaan Gender
- f. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Kota Surabaya dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan program pengarustamaan gender

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran Yang sudah dilaksanakan:

- a. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender
- b. Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan
- c. Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender
- d. Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- e. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender

Rekomendasi /saran:

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan terkait perspektif gender untuk seluruh pegawai Inspektorat Kota Surabaya termasuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil
- b. Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut
- c. Menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam mengintegrasikan aspek gender ke dalam semua kebijakan dan program
- d. Implementasi sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Inspektorat Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain :

a. E-Audit

E-audit mendukung pengarusutamaan gender dengan menyediakan platform pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan pemantauan anggaran responsif gender, memastikan program yang adil untuk semua kelompok. Dengan fitur monitoring dan evaluasi, E-Audit juga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kebijakan publik agar lebih inklusif gender. Situs ini memudahkan Inspektorat dalam mendorong keterbukaan informasi, mendukung kesetaraan akses, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program responsif gender di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

E-Audit ini menjadi penting karena tingginya beban pekerjaan dan entitas yang diperiksa dengan kondisi SDM terbatas, data masih dalam bentuk fisik, jarak obyek pemeriksaan yang berjauhan sehingga waktu untuk pemeriksaan berkurang untuk perjalanan, verifikasi data Laporan Hasil Pemeriksaan belum dilakukan secara elektronik sehingga masih tergantung pada dokumen fisik, data yang tidak terintegrasi karena masih mengandalkan Microsoft Office dengan berkas fisik sebagai arsip, dan pemilihan kode temuan pemeriksaan antar auditor yang satu dengan yang lain tidak seragam.

Sistem Informasi Pengawasan terintegrasi berbasis elektronik E-Audit berisi antara lain :

1. SIGAP : Sistem Informasi Pengawasan Disiplin Pegawai merupakan Sistem Informasi Pencatatan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya
2. Program kerja pengawasan tahunan
3. Pendampingan dan Reviu : Pendampingan dan reviu yang dilakukan Auditor untuk menjembatani maksud dan tujuan terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit.
4. MCP KPK-RI : MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK-RI merupakan fitur untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan

5. Unit Pengendalian Gratifikasi : Unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
6. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) : Rangkaian sistematis, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
7. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
8. Manajemen Risiko : manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.
9. Zona Integritas : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diLingkungan Pemerintah
10. Risiko Fraud : mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko kecurangan dalam organisasi.

b. WBS (Whistleblowing System)

Whistleblowing System (WBS) yang merupakan aplikasi untuk penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Aplikasi pengaduan ini dibentuk sebagai upaya penurunan angka pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya melalui upaya tindak lanjut penanganan pengaduan.

Lampiran

1. SK PUG Inspektorat Kota Surabaya [SK TIM FOCAL POINT](#)
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Inspektorat Kota Surabaya
 - Persiapan Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan menghadirkan Dr. Tri Soesantari, Dra., MSi. dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai Narasumber
 - Internalisasi PUG (Capacity Building Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) Perangkat Daerah Tahun 2025
 - Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur bertempat di Convention Hall Lantai 4 Gedung SIOLA Jl. Tunjungan No. 1 Surabaya tanggal 16 s.d 20 Juni 2025;
 - Inspektorat Kota Surabaya bersama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) serta beberapa Perangkat Daerah lainnya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melanjutkan kegiatan FGD Praktik Baik Tata Kelola Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya hari kedua.
Fokus pembahasan pada FGD ini adalah Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka.
 - Untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam audit kinerja penanganan kemiskinan, Inspektorat Kota Surabaya melaksanakan konsultasi dan bimbingan teknis dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Timur
 - Inspektorat Kota Surabaya melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Penyusunan Kertas Kerja Audit Tematik Stunting. Acara ini dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo
 - Inspektorat mengikuti Desk Pendataan Pendapatan dan Intervensi Keluarga Miskin di Ruang Rapat Majapahit Kantor Bappedalitbang. Kegiatan ini bertujuan untuk memfinalisasi data keluarga miskin di Kota Surabaya.
 - Inspektorat Kota Surabaya Melaksanakan Rapat Pembahasan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Surabaya
 - Inspektorat Kota Surabaya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan Rapat Koordinasi terkait Penyusunan Kertas Kerja Audit Tematik Stunting

- Pada Hari Jumat 20 Desember 2024 Inspektorat Melaksanakan Pendampingan penyelesaian permasalahan korupsi RT. 02 RW. 06 Kelurahan Tenggilis Mejoyo Dugaan Penyalahgunaan Keuangan RT
- Inspektorat sebagai APIP melaksanakan Monev terkait Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Bag. Perekonomian, Dinas Pertanian Dinas Koperasi yang dilaksanakan setiap bulan;
- Inspektorat Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim TAPD terkait pemantauan optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Inspektorat Kota Surabaya Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Manajemen Risiko Kecurangan (Fraud) sesi 1 & 2 yang di laksanakan di OPD dan Kecamatan Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan 18 s.d 19 Maret 2025
- Inspektorat Kota Surabaya melaksanakan Rapat bersama dengan OPD acara Iso Takon Bagian Organisasi Rek dengan tema Penguatan Zona Integritas;
- Inspektorat Kota Surabaya bersama dengan Puskemas tenggilis Mejoyo menerima Kunjangan Studi Tiru dari Pemerintah Kota Mojokerto terkait Zona Integritas;
- Inspektorat Kota Surabaya berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Prov. Jatim terkait evaluasi Program Strategis Nasional terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kota Surabaya;
- Inspektorat bersama dengan Tim TAPD mendampingi Bapak sekda pertemuan dengan BPK Perwakilan Prov. Jatim acara Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024
- Inspektorat Bekerjasama dengan BPKP Koordinasi dan monitoring pemenuhan tindak lanjut AOL (Area of Improvement) Kapabilitas APIP dan pemenuhan indikator Telaah Sejawat pada Inspektorat Kota Surabaya
- Inspektorat Kota Surabaya melakukan Rapat Koordinasi Tentang program kerja Komisi Penyuluhan Anti Korupsi Kota Surabaya Tahun 2025 dalam mendukung Kota Surabaya sebagai Kota Anti Korupsi.
- Pemerintah Kota Surabaya Mendapatkan Penghargaan dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 98,30% tertinggi se-Jawa Timur;

- Inspektorat Kota Surabaya Melakukan rapat koordinasi bersama dengan Bagian Hukum dan OPD terkait sehubungan dengan adanya pengaduan warga terkait permohonan surat keterangan tanah yang terletak di Kecamatan Gunung Anyar di Ruang Rapat Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- Inspektorat Kota Surabaya melakukan pendampingan dan pemeriksaan Guru Olah Raga SDN Simolawang yang melakukan penanganianyaan dengan cara membanting anak SD siswa MI Al-Hidayah ketika melakukan selebrasi kemenangan, yang menyebabkan tulang ekornya retak ketika mengikuti turnamen futsal di SMP Labschool Unesa;
- Pada acara Resepsi Ulang Tahun Kota Surabaya ke 732 yang dilaksanakan di Halaman Balai Kota Surabaya, Inspektorat Kota Surabaya salah satu Perangkat daerah yang mendapatkan 4 Penghargaan Oleh Bapak Walikota Surabaya :
 1. Atas pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Surabaya mendapat nilai 90,24 dengan Predikat AA dari KemenPAN RB
 2. atas pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Surabaya mendapat nilai 100,67 dengan predikat A- dari KemenPAN RB
 3. atas pencapaian Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPAN RB
 4. atas pencapaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kota Surabaya dengan nilai 98 dari KPK
- Inspektorat melakukan pendampingan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Rekomendasi BPK Perwakilan Prov. Jatim Terkait Penghapusan Piutang Melalui Piutang Daerah Telah Optimal (PPD TO) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (19 Juni 2025)
- Inspektorat Kota Surabaya mengikuti Kegiatan Inspektorat Prov. Jatim dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan APIP se-Jawa Timur bersamaan dengan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti pelaksanaan QA Telaah Sejawat Inspektorat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan Tanggal 20 s.d. 21 Juni 2025, di Balai Kota Koesoemo Wicitro Jl. S. Supriadi No.18, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
- Inspektorat pada hari Rabu 02 Juli 2025 Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Monitoring & Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025 dan Pemenuhan Indikator Monev PPG di Gol KPK dengan narasumber Sdr. Badrul, S. Sos., M.M. (Penyuluh Antikorupsi, Ahli Utama);

- Pada Tanggal 3 Juli 2025 Inspektorat Kota Surabaya memberikan dukungan Penuh Kepada Para Atlet Softball Puteri Kontingen Kota Surabaya dalam ajang PORPROV IX Jawa Timur yang di selenggarakan di Gor Cakrawala Universita Negeri Malang. Dan kemenangan gemilang atlet softball Putri Kota Surabaya atas Kabupaten Jombang dengan Skor Akhir 14-2;
- Inspektorat menghadiri undangan BPK Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Kerugian Daerah (PKO) sampai dengan Semester I Tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penggunaan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Inspektorat turut memeriahkan Gebyar Hari Koperasi ke – 78 hari dengan mengusung tema yakni “Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur”. Sabtu 26 Juli 2025 di Halaman Balai Kota Surabaya Dalam peringatan Harkopnas Ke-78 dilaksanakan berbagai kegiatan menarik. Diantaranya, lomba fotografi, lomba menggambar untuk anak-anak, hingga bazar UMKM;
- Pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2025 Inspektorat Kota Surabaya mengadakan Sosialisasi anti Korupsi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang di hadiri Oleh Para Guru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya diharapkan mampu membangun budaya integritas dan mencegah Pratik Korupsi Sejak Dini;
- Inspektorat meleksanakan Pendampingan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025 Pada Tahap Persiapan Dana Kelurahan 1(Tahap Perencanaan) , 2 dan 3 (Tahap Pelaksanaan) pada Kecamatan Genteng, Mulyorejo, Tegalsari, Simokerto, Sawahan, Gayungan, Jambangan dan Wonocolo, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Wiyung, Gunung Anyar, Tenggilis Mejoyo, Sukolilo, Tambaksari
- Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya mengikuti Puncak acara HUT DWP Kota Surabaya ke 25 "Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045 yang di Buka Oleh Ibu Rini Indrayani, S.Farm dan Bapak Sekda Kota Surabaya. DWP Inspektorat Kota Surabaya mendapatkan Beberapa Awarding Juara 1 Lomba Festival Keluarga Hebat dan Juara Harapan II Lomba E-Reporting LPPK Tahun 2024;
- Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya ikut berpartisipasi dalam Kegiatan DWP Kota Surabaya acara Peringatan Hari Ibu Tgl 24 Desember 2024 dengan mengikuti acara Lomba Hampers UMKM dan Lomba Senam PERWOSI di Convention Hall Arif rahman Hakim;

- Pada Pembukaan Awal Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya menyelenggarakan pertemuan rutin dan silaturahmi para anggota bekerja sama dengan Karita Muslim Square Surabaya. Pembukaan di buka Oleh Ibu Nurlia Sally, S.E., M.M. Rangkaian acara tersebut antara Demo Hijab dan Color Analyst untuk membantu para ibu-ibu DWP untuk memaksimalkan penampilan dalam berhijab sesuai dengan tema warna kulit kita;
- Dalam keliagatan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2025 menyelenggarakan acara Garage Day tahun 2025. Dalam acara ini, Dharma Wanita Inspektorat Kota Surabaya turut hadir memeriahkan acara Garage Day yang diselenggarakan di Kecamatan Gayungan berupa produk-produk kebutuhan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri;
- Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya Menyelenggarakan Pertemuan Rutin Di Bulan Agustus 2025 yang dilakaksanakan Pada Tanggal 19 Agustus 2025 bertampat di Ruang rapat Lt. 3 Kantor Inspektorat dengan Agenda Serah Terima Jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Kota Surabaya dan Penyusunan Kepengurusan Organisasi.

LINK KEGIATAN : [Kegiatan RESPONSIF GENDER](#)

3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir
[KEGIATAN RESPONSIF GENDER](#)

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil Pengarustamaan Gender Inspektorat Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025